

## Pembangunan Jalur Pedestrian di Bogor Meleset dari Target

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah membangun jalur pedestrian dan jalur sepeda di sepanjang Jalan Ir. H. Juanda, yang terbentang dari Mall BTM Bogor hingga SMAN 1 Bogor. Pembangunan yang ditargetkan selesai pada Desember tahun ini, mengalami minus 5 persen deviasi dari target yang diharapkan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi ketika ditemui di lokasi pembangunan. Hingga saat ini, kata dia, capaian pembangunan jalur pedestrian mencapai 20 persen. "Jadi ada deviasi sekitar 5 persen. Ini mudah-mudahan dengan starting awal sudah cukup. Memang berat starting awal, kita akan kejar untuk bisa finishing-nya. Inshaallah terkejar," ujar Chusnul, Senin (25/10).

Chusnul menyebutkan, pembangunan yang menelan anggaran sebesar Rp 5,4 miliar dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tersebut, ditargetkan bisa selesai dalam kurun waktu 90 hari kerja. Atau mesti selesai pada 18 Desember 2021 mendatang.

Dalam pelaksanaannya, Chusnul mengaku meng-

alami beberapa kendala. Di antaranya, sosialisasi kepada gedung perkantoran di sepanjang jalan yang akan dibangun jalur pedestrian. Setelah dilaksanakan sosialisasi, baru kontraktor bisa melaksanakan pembangunan. "Artinya setelah kita sepakat dengan beberapa kantor yang sudah mengikuti dengan rencana kita, dan mereka ada permintaan kita akomodasi. Jadi begitu sudah beres, kita langsung jalan. Itu yang menyebabkan kita juga ada deviasi dari minus yang tadi," jelasnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto turut menyoroti adanya deviasi minus 5 persen dari pembangunan jalur pedestrian tersebut. Dia pun mengemukakan agar pembangunan ini segera dikejar dan dikebut.

"Saya titip hari ini pengerjaannya deviasi minus 5 persen, kita titip untuk dikejar dikebut. Saya tidak mau ada yang minus, semua harus positif. Semua harus sesuai dengan jadwal. Tapi dengan kualitas yang terjaga," kata Bima Arya.

Di samping itu, dia mengemukakan, kualitas dari jalur pedestrian tersebut agar dijaga. "Saya titip tadi jangan sampai ini ambles. Karena pedestrian di mana mana kalau pengerasan tidak cukup maksimal, maka akan ambles turun ke bawah," imbuhnya. ● **gio**

## Pemkab Bogor Harus Gelontorkan Rp32,5 Juta per Hari untuk Buang Sampah

**CIBINONG (IM)**- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat membutuhkan dana Rp32,5 juta per hari untuk membuang sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo. "Jadi kita anggarkan untuk membuang sampah di sana selama enam bulan tapi masih rencana, karena keterbatasan anggaran," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Asnan, kemarin.

Pemkab Bogor dijatah membuang sampah di TPPAS yang terletak di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor itu 260 ton per hari dengan biaya Rp125 ribu per ton atau jika dikalkulasi mencapai Rp32,5 juta per hari. Pasalnya, tahun 2022 TPPAS milik Pemprov Jawa Barat itu direncanakan mulai beroperasi 40 persen dari kapasitas 1.800 ton.

Asnan menyebutkan bahwa sejauh ini Pemkab Bogor masih memprioritaskan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, mengingat produksi sampah harian mencapai 2.700 ton. "Nanti kita mau lakukan penataan juga di TPA Galuga. Kita kerja sama dengan Pemkot

Bogor karena memiliki area pembuangan lebih besar dari kita," kata Asnan.

Seperti diketahui, Pemkab Bogor memperpanjang kerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor terkait pembuangan sampah di TPA Galuga yang kontraknya habis 31 Desember 2020.

Kerja sama dengan Pemkot Bogor telah berjalan sejak 2011, kemudian terakhir kali diperpanjang pada 2016 lalu. Karena, saat ini Pemkab Bogor tidak memiliki pilihan untuk membuang sampah selain di Galuga.

Selama itu pula, Pemkab Bogor bergantung pada Pemkot Bogor dalam pengelolaan sampah, khususnya pembuangan di TPA Galuga, meski Galuga berada di Kecamatan Cibungbulang, yang berlokasi di Kabupaten Bogor.

Pasalnya, TPA Galuga sebagian besar merupakan aset milik Pemkot Bogor, dengan luas lahan sekitar 36 hektar, sedangkan Pemkab Bogor hanya memiliki luasan 3,7 hektar. Dengan hanya memiliki luasan lahan pembuangan 3,7 hektar, membuat Pemkab Bogor harus membuang sampah di lahan milik Pemkot Bogor. ● **gio**



IDN/ANTARA

**PENUTUPAN SEMENTARA SEJUMLAH SEKOLAH DI BANDUNG**  
Petugas melakukan disinfeksi di sebuah kelas di SDN 065 Cihampelas yang ditutup sementara di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/10). Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan menutup sementara 14 sekolah di Kota Bandung akibat temuan kasus COVID-19 hasil tes usap PCR secara acak di sejumlah sekolah.

## Tempat Hiburan Dibuka, Pemkot Bandung Pastikan Lakukan Pengawasan Ketat

**BANDUNG (IM)**- Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan, jajarannya tidak akan kendor untuk melakukan pengawasan dan penindakan seiring lampu hijau untuk tempat hiburan malam seperti bar, klub malam, karaoke, dan pub.

"Pastinya kita lakukan pengawasan. Dinas terkait saya sudah intruksikan untuk melakukan pengawasan, termasuk imbauan protokol kesehatan, karena harus tetap menjaga proses," kata Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Senin (25/10).

Menurutnya, dalam kegiatan pengawasan nanti akan turut melibatkan unsur kewilayahan. Artinya, pengawasan tidak hanya melibatkan dinas terkait. Akan tetapi juga melibatkan aparat-aparat di kawasan tempat hiburan malam.

Dengan kembali diberikannya relaksasi, Yana Mulyana berharap tidak ber-

dampak kepada peningkatan angka Covid-19 di Kota Bandung. Harapan tersebut disampaikan, mengingat tengah naiknya angka Covid-19 di Kota Bandung dalam kurun waktu belakangan.

"Karena saya melihat itu, estimasi reproduksi virus di angka 1,07 naik. Padahal kita enggak boleh di angka 1 sebelumnya 0,57. Tapi penambahan kasus biasanya 1 digit, kemarin 2 digit. Biasanya kan cuma 7 atau 9 sehari. Ya mudah-mudahan jangan naik lagi," ucap Yana Mulyana.

Seperti diketahui, tiga hari terakhir angka Covid-19 terus mengalami peningkatan. Dari laman Bandung.go.id, pada Jumat 22 Oktober, kasus konfirmasi aktif Covid-19 berada di angka 105. Kemudian 124 kasus di hari berikutnya, dan pada Minggu (24/10), kasus Covid-19 di Kota Bandung menyentuh angka 140 kasus. ● **pur**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## SILATURAHMI PENGASUH PONDOK PESANTREN PUTRI

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) didampingi Ulama Nahdlatul Ulama Gus Bahauddin Nursalim (kiri) dan pengasuh pondok pesantren putri Ar-Risalah Lirboyo Ning Aina (tengah) mengikuti kegiatan bertajuk Ngaji Bareng Gus Baha di Pondok Pesantren Putri AR-Risalah Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (25/10). Ngaji bareng yang diselenggarakan Rabithoh Ma'ahidil Islamiyah (RMI) putri tersebut sebagai ajang silaturahmi antar pengasuh pondok pesantren putri di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

## BERTAHUN-TAHUN JADI KOMODITAS POLITIK

# Warga Cigudeg dan Rumpin Tagih Janji Ridwan Kamil Bangun Jalan Tambang

Masyarakat tak mau pandemi Covid-19 menjadi alasan tidak terbangunnya jalan khusus tambang karena tidak siapnya APBD. Mereka minta jalan khusus tambang sudah terbangun sebelum pemilihan umum, karena rencana pembangunan jalan khusus tambang ini bakal menjadi komoditas politik saja seperti sebelumnya.

## PARUNG PANJANG

(IM)- Warga sekitar usaha tambang seperti Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan

Rumpin beserta Pemkab Bogor mendesak Gubernur Jabar, Ridwan Kamil merealisasikan janjinya untuk membangun

jalan khusus tambang.

Jalan khusus tambang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat karena selain mengakibatkan rusaknya jalan, kemacetan lalu lintas, debu, dan dampak negatif lainnya.

"Sudah bertahun-tahun janji bangun jalan khusus tambang tidak juga terealisasi, saya minta Gubernur Jabar, Ridwan Kamil segera membangun jalan khusus tambang tersebut," kata Ochan dari organisasi Masyarakat Peduli Parungpanjang kepada wartawan, Senin (25/10).

Ia menambahkan, tawaran Pemprov Jabar kepada asosiasi pengusaha tambang di sekitar lokasi untuk bersama-sama membangun jalan khusus tambang harus disambut baik

para pengusaha.

"Masyarakat tak mau pandemi Covid-19 menjadi alasan tidak terbangunnya jalan khusus tambang karena tidak siapnya APBD. Kami minta jalan khusus tambang sudah terbangun sebelum pemilihan umum, karena rencana pembangunan jalan khusus tambang ini bakal menjadi komoditas politik saja seperti sebelumnya," tambahnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin menuturkan permintaan pembangunan jalan khusus tambang juga disuarakan Pemkab Bogor dan anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor. "Akhir pekan kemarin, saya juga mengkomunikasikan tindak lanjut atau realisasi

rencana pembangunan jalan khusus tambang ke Gubernur Ridwan Kamil atau kang Emil, dan ia mengarahkan agar kita berkoordinasi lebih lanjut dengan BUMD PT Marga Sarana Jabar," tutur Burhanudin.

Dia melanjutkan, dengan rencana detail engineering design (DED) jalan khusus tambang yang baru Pemprov Jabar akan lebih mudah merealisasikan rencana tersebut.

"Dulu kan rencananya panjang jalan khusus tambang itu 27 Km dan saat ini sudah berkurang hingga 12 km serta lahannya milik Perhutani. Sepertinya tidak ada alasan lagi menunda pembangunan jalan khusus tambang tersebut," tandas Burhanudin. ● **gio**

## Emil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

**DEPOK (IM)**- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Emil), dan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, didesak untuk mencabut peraturan yang mendiskriminasi jemaah Ahmadiyah di wilayah masing-masing, yaitu Pergub Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 serta Perwal Kota Depok Nomor 9 tahun 2011.

Pergub dan Perwal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan bersekuler dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. "Kedua beleid tersebut inkonstitusional, karena melanggar Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," kata Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (25/10). Isu itu kembali menyeruak gara-gara Satpol PP Kota Depok dengan sejumlah massa mendatangi dan meneyelegi lagi Masjid Al-Hidayah milik jemaah Ahmadiyah Depok di Sawangan pada Jumat lalu. Penyegelelan ulang yang berlangsung selepas

shalat Jumat itu diwarnai dengan teriakan ancaman serta ujaran kebencian dari sekitar 50 orang yang turut mengawal Satpol PP Kota Depok kepada jemaah Ahmadiyah.

Satpol PP Kota Depok melakukan penyegelelan ulang itu dengan dasar hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 2008, Pergub, serta Perwal. Padahal, Pergub dan Perwal itu menyimpang dari SKB 3 Menteri pada 2008 yang dijadikan dasar dari kebijakan itu. Keduanya melarang total aktivitas jemaah Ahmadiyah, baik di Depok maupun di Jawa Barat, termasuk dalam hal pemasangan papan nama organisasi, papan nama peribadatan, sampai penggunaan atribut. "Padahal SKB 3 Menteri 'hanya' memperingatkan agar JAI tidak melanggar UU PNPS 1965 dan menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam," kata Halili.

Selain itu, JAI merupakan organisasi resmi yang telah terdaftar secara hukum. Masjid Al-Hidayah di Sawangan pun

sudah mengantongi IMB (izin mendirikan bangunan) rumah ibadah sejak 2007. SETARA Institute juga mendesak Presiden RI Joko Widodo agar SKB 3 Menteri 2008 dicabut. Dalam riwayat diskriminasi, persekusi, serta bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap jemaah Ahmadiyah di Indonesia, beleid ini nyaris selalu jadi pemicu.

"Mengacu pada data longitudinal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) SETARA Institute, dalam lima tahun terakhir saja, JAI menjadi korban pelanggaran KBB dalam 54 peristiwa dan 83 tindakan," ujar Halili.

"SETARA Institute mendesak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk mengkoordinasikan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung dalam mengakselerasi evaluasi, peninjauan ulang, dan/atau pencabutan SKB 3 Menteri 2008," lanjut Hasan. ● **pur**



IDN/ANTARA

## PRODUKSI TINGKAT ADAPTIF NETRA DI BANDUNG

Pekerja menyelesaikan pembuatan tingkat adaptif bagi penyandang disabilitas netra di BRSPDSN Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/10). Kementerian Sosial melalui BRSPDSN Wyata Guna memproduksi sedikitnya 1.000 tingkat adaptif yang dilengkapi sensor air, lampu, dan GPS untuk dibagikan kepada disabilitas netra dengan memberdayakan pekerja dari disabilitas daksa, rungu, netra dan eks-napza.

## Heboh! Pasien ODGJ di Bogor Kabur lalu Lompat dari Jembatan

**BOGOR (IM)**- Wanita berinisial RM (20), diduga melompat dari atas jembatan aliran Sungai Cisadane di Jalan KH Muhammad Falak dalam keadaan sudah tergeletak," jelas Rachmat.

Selanjutnya, lanjut Rachmat, tim SAR gabungan melakukan evakuasi dan dibawa kembali ke RS Marzoecki Mahdi. Keterangan dari keluarga, RM sudah pernah beberapa kali mencoba bunuh diri. "Pasien dibawa ke rumah sakit. (Kondisi) pasien masih hidup dan selamat," ungkapnya.

Terpisah, Humas RS Marzoecki Mahdi, Prahardian Priatama membenarkan bahwa RM yang diduga melompat dari jembatan adalah pasiennya. Tetapi, belum mengetahui pasti kronologi pasien tersebut melarikan diri hingga ditemukan di bawah jembatan. "Iya, pasien ODGJ. Pasien dari IGD belum masuk rawat inap dibawa keluar-ganya. Pasien melarikan diri tanpa diketahui perawat dan dokter jaga IGD untuk kronologis lengkap saya masih komunikasi dengan IGD," singkat Prahardian, ketika dikonfirmasi. ● **gio**

## Bisnis Perhotelan dan Restoran Kota Bogor Membaik

**BOGOR (IM)**- Pada masa pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2, pertumbuhan bisnis dan restoran di Kota Bogor sudah masuk dalam kategori membaik. Kunjungan tamu lebih dari 75%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay menilai pertumbuhan bisnis perhotelan di Kota Bogor saat ini masuk kategori sangat baik. Hal itu tak terlepas dari kasus Covid-19 di Kota Bogor yang terus melandai saat ini.

"Kondisinya saat ini sangat baik. Okupansi hotel kunjungan tamu sudah maksimum PPKM level 2, di atas 75%," kata Yuno, Senin (25/10).

Bukan hanya kasus Covid-19 yang melandai, menurutnya penurunan status PPKM Kota Bogor dari Level 3 ke Level 2 pun jadi salah satu faktor yang menyumbang bisnis perhotelan jadi sangat baik saat ini. Karena, dengan turunnya level status PPKM, sejumlah kebijakan pun mulai dilonggarkan, khususnya aktivitas masyarakat di PPKM Level 2.

"Berdasarkan catatan kami, pertumbuhan bisnis perhotelan dan restoran dari level 3 turun ke level 2 ada peningkatan. Semula kunjungan rata-rata sekitar 20% dan saat ini bisa

lebih dari 75%," ucap dia. Dalam kesempatan ini, Yuno pun berharap kondisi seperti saat ini dapat terus bertahan bahkan bisa membaik lagi, sambil pihaknya tetap mewajibkan pengusaha agar tetap menjalankan proses di tempat usahanya masing-masing. "Kami tetap ingatkan ke teman-teman pengusaha agar jaga proses. Jangan sampai omzet turun lagi karena kurang bisa jaga syarat proses," ujarnya.

Diketahui, Kota Bogor akhirnya berada pada status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level dua bersama DKI Jakarta dan 10 kota/kabupaten se-Jawa Barat Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 53/2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1, yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin pekan lalu.

Dari penurunan level ini, sejumlah sektor pun mulai dilonggarkan, salah satunya terkait perhotelan. Yakni, perhotelan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kapasitas maksimal 50%. Ballroom, ruang rapat, diizinkan buka dan kapasitas maksimal 50% serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas tersebut disajikan dalam kotak dan tidak ada hidangan prasmanan. ● **gio**